

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 yang telah dicabut).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Ganti Rugi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025.

B. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, perihal perluasan objek praperadilan.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL dalam Perkara Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg dalam Perkara Pegi Setiawan.

C. Buku

- Absori. Filsafat Metodologi Penelitian Hukum: Menuju Hukum Progresif Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2019.
- Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana, 2009.
- Adami Chazawi. Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ahmad Redi. Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Bambang Waluyo. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bernard L. Tanya. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- CST. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Negara Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kelik Wardiono. Paradigma Kritis dalam Studi Hukum. Yogyakarta: FH UMS Press, 2020.
- Lilik Mulyadi. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Luhut M.P. Pangaribuan. Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- M. Syamsudin. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2005.
- Ni'matul Huda. Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2023.

- Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rhona K.M. Smith, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2006.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1992.
- Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- D. Jurnal Ilmiah**
- Amrianto, A.D. 'Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan.' *Jurnal Hukum Samudra Keadilan (JHSK)*, Vol. 18, No. 2 (2023): 1–15. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/6419>
- Ahmad Sofian. 'Efektivitas Lembaga Praperadilan sebagai Kontrol terhadap Upaya Paksa Penyidik.' *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (2014): 85–98.
- Darmawan, N.G. 'Rekonstruksi Ideal Hak Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap di Indonesia.' *Jurnal Hukum*, Vol. 12 (2024). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4047473>
- Efendi, S.; Rodliyah; Pancaningrum, R.K. 'Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona).' *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2021): 50–70. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2303765>
- Erdiansyah. 'Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.' *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1 (2013): 44–58.
- Fitria, I.; Ahlina, N. 'Perlindungan Hak-Hak Tersangka Error in Persona.' *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 1 (2024): 1–20. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/359>
- Handayani, G., et al. 'The Rights of Unlawful Arrest Victims to Demand for Compensation in Indonesian Criminal Justice System.' *International Journal of Law*, Vol. 7, No. 1 (2021): 32–45. <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2021/vol7issue1/7-1-32-674.pdf>
- Henny Saida Flora. 'Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.' *UBELAJ Journal*, Vol. 3, No. 2 (2018): 137–153.

- Niken Subekti Budi Utami. 'Perlindungan Hak Tersangka Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.' *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1 (2016): 28–44.
- Pramesti, F.A. 'Jaminan Ganti Rugi serta Rehabilitasi terhadap Korban Error in Persona.' *Jurnal Hukum Pratama*, Vol. 3, No. 1 (2024): 1–18. <https://jurnalhukumpratama.ac.id/files/jaminan-rehabilitasi.pdf>
- Rahmawati, E. 'Vacuum Effect of Wrongful Criminal Justice Process: The Case of Indonesia.' ResearchGate Preprint (2025). <https://www.researchgate.net/publication/377578905>
- Susilo, E.; Negara, D.S.; Lufsiana. 'Restoring Victims of Wrongful Arrest: Automatic Compensation through a Parallel Justice Approach.' *Law Development Journal (LDJ) Unissula*, Vol. 6, No. 3 (2024): 1–22. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/download/48284/13849>
- Wahyu Beny Mukti Setyawan. 'Tinjauan Yuridis Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Akibat Salah Tangkap Berdasarkan KUHAP.' *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (2016): 209–228.
- Widijowati, D. 'Human Rights and Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest in Indonesia.' *Review of Humanities and Social Sciences*, Vol. 3, No. 1 (2023): 45–60. <https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/download/108/89/400>
- Yance Arizona. 'Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.' *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021): 475–493.
- E. Laporan dan Dokumen Lembaga**
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan Tahunan 2019: Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan Tahunan 2020: Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM. Jakarta: Komnas HAM, 2021.
- KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Laporan Tahunan: Potret Kekerasan Aparat dan Salah Tangkap di Indonesia. Jakarta: KontraS, 2019.
- F. Instrumen Hukum Internasional**
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966, United Nations Treaty Series, Vol. 999, hlm. 171. Diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
- United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UN General Assembly Resolution 40/34, 29 November 1985.